

**TINJAUAN PELATIHAN & UJIAN SERTIFIKASI
KEAHLIAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BAPPENAS TERHADAP TINGKAT KELULUSAN
(Studi Kasus : Pelatihan & Ujian Sertifikasi Oleh FT-UA di
Bapelkes Gunung Pangilun Padang, bulan November 2008)**

SKRIPSI

Oleh

NADIA BIRRA
04 172 060



**JURUSAN TEKNIK SIPIL – FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

Abstrak

Sertifikasi merupakan salah satu syarat bagi panitia/pejabat pengadaan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 10 keppres no 80 tahun 2003. Tujuan sertifikasi adalah untuk memberikan pengakuan atas kemampuan atau kompetensi seseorang dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu disiplin tertentu. Sertifikat diperoleh melalui pelatihan dan ujian yang diadakan oleh suatu lembaga tertentu. Fakta menunjukkan bahwa persentase kelulusan peserta ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh Bappenas masih rendah, rata-rata tingkat kelulusan peserta dari tahun 2005 sampai bulan Mei tahun 2008 hanya sebesar 23.03 %. Untuk itu perlu diadakan penelitian untuk mengetahui penyebab rendahnya tingkat kelulusan hasil ujian sertifikasi. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada para peserta pelatihan dan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik Universitas Andalas sebanyak 100 orang. Selanjutnya dari data tersebut dihitung persentase tingkat kelulusannya.

Dari hasil penyebaran kuisioner dapat dilihat bahwa tingkat kelulusan ujian masih rendah. Dengan rata-rata tingkat kelulusan yaitu sebesar 20 %. Beberapa penyebab peserta gagal dalam mengikuti ujian sertifikasi antara lain, kurang memahami dasar hukum pengadaan itu sendiri yaitu keppres no 80 tahun 2003. Kurangnya waktu pelaksanaan pelatihan yaitu sebanyak 2 hari yang diberikan oleh panitia juga menjadi salah satu penyebab susahnyamemahami materi-materi yang diberikan pada saat pelatihan.

Kata Kunci: sertifikasi, keppres no.80 tahun 2003, tingkat kelulusan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya pembangunan diberbagai bidang menimbulkan tuntutan tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan kebutuhan dan prasarana fisik sejalan dengan pertumbuhan kemakmuran hidup. Upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana fisik diwujudkan melalui pembangunan. Untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal, dibutuhkan jasa konsultan dan kontraktor dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pada institusi pemerintah, pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilakukan begitu saja. Tetapi harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah keputusan presiden (keppres) no. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah serta semua perubahannya. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, tidak semua orang diperbolehkan untuk menjadi panitia lelang/pengadaan. Orang-orang yang duduk dalam kepanitiaan harus memiliki sertifikat sebagai ahli pengadaan atau minimal pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa.

Untuk dapat mencapai tingkat kinerja yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dalam Keppres 80/2003 telah ditetapkan persyaratan bagi panitia/pejabat pengadaan sebagaimana tercantum dalam pasal 10, yaitu harus memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan, memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan, memahami

isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keppres 80/2003, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan, serta memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fakta menunjukkan bahwa persentase kelulusan peserta ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh Bappenas masih rendah. Padahal cukup banyak dari peserta ujian sertifikasi sudah bergelut sehari-hari dengan pengadaan barang diinstitusinya, namun ketika ujian tidak lulus juga. Sudah banyak workshop yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan bahkan perguruan tinggi terkenal, namun persentase kelulusannya tetap mengecewakan.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- Mengkaji efektifitas pelatihan sertifikasi keahlian panitia pengadaan barang dan jasa.
- Mengetahui penyebab rendahnya tingkat kelulusan ujian sertifikasi
- Mengetahui sejauh mana sertifikat pelatihan dan sertifikat kelulusan dipakai pada sebuah instansi.

1.2.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi masukan terhadap para calon peserta ujian sertifikasi mengenai cara – cara yang dapat dilakukan calon peserta ujian agar lulus ujian sertifikasi dengan mudah.

BAB VI

PENUTUP

1 Kesimpulan

- Pelatihan sangat diperlukan dalam pemahaman materi yang akan di berikan pada saat ujian.
- Rendahnya tingkat kelulusan pada ujian sertifikasi antara lain disebabkan oleh kurang memahami dasar hukum pengadaan itu sendiri yaitu keppres no 80 tahun 2003.
- Kurangnya waktu pelaksanaan pelatihan yaitu sebanyak 2 hari yang diberikan oleh panitia juga menjadi salah satu penyebab susah nya memahami materi-materi yang diberikan pada saat pelatihan.
- Di beberapa instansi sertifikat pelatihan dan ujian tidak digunakan lagi sebagai syarat untuk menjadi panitia pengadaan barang/jasa. Sedangkan untuk beberapa instansi yang lain sertifikat pelatihan dan ujian sertifikasi masih digunakan sebagai syarat untuk menjadi panitia pengadaan barang/jasa.
- Selain kurang memahami konsep dasar keppres no. 80 tahun 2003, tidak adanya pengalaman mengikuti ujian juga menjadi salah satu penyebab peserta sulit memahami soal-soal yang diberikan pada saat ujian.

2 Saran

Bagi yang sudah pernah atau baru mau akan mengikuti Ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Bappenas, ada beberapa hal yang dilakukan untuk membantu agar bisa dalam ujian sertifikasi antara

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Bab I s/d Bab IX (online www.bnsp.go.id akses September 2008)
2. Forum Pengadaan Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Bappenas (online www.bappenas.go.id akses Agustus 2008)
3. Hidayat, Benny. “ *Aspek Hukum dan Administrasi Kontrak* “. Manajemen Rekayasa Konstruksi Jurusan Teknik Sipil FT UA. Padang, 2004
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003, “*Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*”.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 “*Perubahan keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*”.
6. Pengumuman Hasil Ujian Sertifikasi Pengadaan Bappenas wilayah Sumbar (online www.bappenas.go.id akses Agustus 2008)
7. Simulasi Soal-soal Ujian Sertifikasi (online www.bappenas.go.id akses Agustus 2008)
8. Tips Agar Lulus Sertifikasi Bappenas « Just The Way You Are (online www.bappenas.go.id akses September 2008)